SKRIPSI

PENGARUH BENCANA KARHUTLA DI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN KOLEKTIF TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA TAHUN 2019

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Kajian Perbatasan

Oleh:

Muhammad Arkaan Thaariq

NIM. E1111211054

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

PENGARUH BENCANA KARHUTLA DI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN KOLEKTIF TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA TAHUN 2019

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan

Oleh:
Muhammad Arkaan Thaariq
NIM. E1111211054

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH BENCANA KARHUTLA DI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN KOLEKTIF TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA TAHUN 2019

Tanggung Jawab Yuridis pada:

Muhammad Arkaan Thaariq

NIM. E1111211054

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dewi Suratiningsih, S.IP., M.A.
NIP. 198609142019032005

Tanggal: 27 Agustus 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP, M.A.
NIDN. 0028119007

Tanggal: 18 September 2026

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH BENCANA KARHUTLA DI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN KOLEKTIF TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA TAHUN 2019

Oleh:
Muhammad Arkaan Thaariq
NIM. E1111211054

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Senin/12 Januari 2026
Waktu : 13.00
Tempat : Ruang Sidang R 6

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dewi Suratiningsih, S.IP., M.A.	Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP, M.A.
NIP. 198609142019032005	NIDN. 0028119007
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Laras Putri Olifiani, S.IP., M.HI	Akhmad Rifky Setya Anugrah, S.IP., M.Si
NIP. 1992204232019032013	NIP. 199211132022031012

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat pada tahun 2019 menjadi salah satu kejadian paling signifikan dalam satu dekade terakhir dan memicu polusi asap lintas batas yang berdampak langsung terhadap Malaysia. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan krisis lingkungan, tetapi juga memengaruhi dinamika hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana karhutla Kalimantan Barat pada tahun 2019 memengaruhi hubungan kedua negara melalui munculnya ketegangan diplomatik dan perubahan pola kerja sama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kerangka Konsep Keamanan Kolektif Alexander Orakhelashvili, yang menitikberatkan pada dua indikator: *identification of a threat* dan *response*. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumen resmi, pemberitaan media, serta wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia secara tegas mengidentifikasi kabut asap sebagai ancaman lintas batas yang merusak citra diplomatik Indonesia. Namun, situasi ini pada akhirnya mendorong respons berupa peningkatan koordinasi teknis dan diplomatik melalui kerangka *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Secara keseluruhan, karhutla 2019 berperan sebagai pemicu utama penguatan diplomasi lingkungan dan kerja sama regional kedua negara.

Kata Kunci: Karhutla, Hubungan Indonesia-Malaysia, Keamanan Kolektif, Kabut Asap Lintas Batas, AATHP, 2019.

ABSTRACT

The forest and land fires (*karhutla*) in West Kalimantan in 2019 were among the most significant events of the past decade and triggered transboundary haze pollution that directly affected Malaysia. This situation not only caused an environmental crisis but also affected the dynamics of bilateral relations between Indonesia and Malaysia. This study aims to describe how the 2019 forest and land fires in West Kalimantan affected relations between the two countries through the emergence of diplomatic tensions and changes in patterns of cooperation. This study employs a descriptive qualitative method using Alexander Orakhelashvili's Collective Security Concept, which focuses on two indicators: identification of a threat and response. Data were obtained through a literature review, official documents, media reports, and interviews with relevant institutions. The results show that Malaysia explicitly identified the haze as a transboundary threat that damaged Indonesia's diplomatic image. However, this situation ultimately prompted a response in the form of increased technical and diplomatic coordination through the framework of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Overall, the 2019 forest and land fires served as a major catalyst for strengthening environmental diplomacy and regional cooperation between the two countries.

Keywords: Forest and Land Fires, Indonesia–Malaysia Relations, Collective Security, Transboundary Haze Pollution, AATHP, 2019.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu isu lingkungan paling serius yang dihadapi Indonesia dan telah berlangsung secara berulang setiap tahun. Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap karhutla, terutama pada tahun 2019 ketika luas lahan terbakar mencapai rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Situasi ini tidak hanya menimbulkan dampak signifikan secara domestik, tetapi juga memicu kabut asap lintas batas (*transboundary haze*) yang menyebar hingga negara tetangga, khususnya Malaysia. Polusi lintas batas tersebut berdampak pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta kualitas udara kawasan sehingga menjadikan karhutla sebagai isu lingkungan yang berkembang menjadi persoalan diplomatik regional.

Bencana karhutla tahun 2019 merupakan tantangan yang mampu mengubah dinamika hubungan Indonesia-Malaysia, yang selama ini didasarkan pada prinsip persahabatan dan *ASEAN Way*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana bencana karhutla di Kalimantan Barat pada tahun 2019 memengaruhi dimensi-dimensi kunci dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi titik-titik ketegangan diplomatik, mekanisme respons yang diaktifkan, serta implikasi jangka panjang terhadap komitmen pencegahan bencana.

Untuk menganalisis pengaruh bencana lingkungan terhadap hubungan antarnegara, penelitian ini menggunakan Konsep Keamanan Kolektif (*Collective Security*) dari Alexander Orakhelashvili (2011). Konsep ini relevan karena

memandang bahwa ancaman terhadap satu anggota, dalam hal ini ancaman lingkungan dan kesehatan publik akibat kabut asap, harus dianggap sebagai ancaman bagi seluruh komunitas, yakni Indonesia dan Malaysia sebagai tetangga dan anggota ASEAN. Analisis dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu *identification of a threat* dan *response*. Indikator *identification of a threat* menyoroti bagaimana bencana diakui sebagai ancaman bersama yang memerlukan tindakan kolektif serta bagaimana hal tersebut memengaruhi citra diplomatik Indonesia. Sedangkan Indikator *response* membahas bentuk-bentuk respons diplomatik, teknis, dan kebijakan yang diambil kedua negara baik secara bilateral maupun regional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan unit analisis karhutla di Kalimantan Barat dan unit eksplanasi hubungan Indonesia-Malaysia. Data diperoleh dari studi pustaka, laporan resmi, publikasi pemerintah, pemberitaan media, serta wawancara dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali keterkaitan antara faktor lingkungan, kebijakan nasional, serta dinamika diplomasi regional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karhutla tahun 2019 memiliki pengaruh signifikan terhadap hubungan Indonesia–Malaysia. Pada aspek *identification of a threat*, Malaysia secara tegas mengakui kabut asap sebagai ancaman keamanan lingkungan yang bersifat lintas batas. Hal ini diperkuat oleh data meteorologi dan satelit yang menunjukkan korelasi langsung antara peningkatan hotspot di Kalimantan Barat dan penurunan kualitas udara di Malaysia.

Tekanan politik dalam negeri Malaysia juga mendorong pemerintahnya untuk mengambil langkah diplomatik cepat, termasuk pengiriman nota protes serta desakan agar Indonesia bertanggung jawab dan menindak tegas pelaku pembakaran.

Sementara itu, respons awal Indonesia cenderung defensif dengan menolak klaim bahwa seluruh kabut asap berasal dari wilayahnya. Sikap ini menimbulkan tensi diplomatik yang memperburuk citra Indonesia sebagai aktor regional yang berkomitmen terhadap kerja sama lingkungan. Namun, seiring meningkatnya bukti ilmiah serta tekanan internasional, Indonesia mulai mengakui skala bencana dan memperkuat upaya penanggulangan karhutla melalui pengerahan personel besar-besaran, pemadaman udara, modifikasi cuaca, patroli terpadu, serta penegakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat.

Dalam aspek *response*, kedua negara akhirnya menunjukkan kecenderungan bekerja sama untuk mengatasi bencana secara lebih terstruktur. Melalui kerangka *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP), Indonesia dan Malaysia meningkatkan koordinasi formal dalam hal pemantauan hotspot, pertukaran data, serta pelaksanaan mitigasi teknis. Pertemuan tingkat menteri pada forum ASEAN menjadi wadah penting untuk merumuskan rencana aksi bersama. Secara bilateral, Malaysia menawarkan bantuan teknis, sementara Indonesia memberikan laporan berkala terkait perkembangan pemadaman dan langkah penegakan hukum. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip non-intervensi *ASEAN Way* sering dinilai menghambat respons cepat, karhutla 2019 justru memaksa kedua negara mengambil langkah kolaboratif yang lebih pragmatis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa karhutla di Kalimantan Barat pada tahun 2019 memberikan pengaruh ganda terhadap hubungan Indonesia–Malaysia. Di satu sisi, bencana tersebut memicu ketegangan diplomatik akibat kerusakan citra Indonesia dan perbedaan persepsi atas sumber polusi lintas batas. Namun di sisi lain, bencana yang sama mendorong peningkatan kerja sama bilateral dan regional melalui mekanisme keamanan kolektif. Dengan demikian, karhutla menjadi faktor penting yang memperkuat urgensi diplomasi lingkungan di Asia Tenggara dan menuntut komitmen jangka panjang Indonesia dalam pengelolaan hutan dan pencegahan bencana.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arkaan Thaariq

NIM : E1111211054

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 12 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Muhammad Arkaan Thaariq

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Allah selalu mewujudkan hal yang mustahil melalui cara yang lebih mustahil lagi. Jadi, tenanglah."

"Sebutkanlah nama-Nya, resapilah jalan-Nya, Kelak kau mengingat, kau akan teringat" (Perunggu, 33x)

Persembahan:

1. Kepada Allah SWT, segala puji dan syukur ku panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Setiap langkah, doa, dan usaha dalam perjalanan panjang ini dapat terlewati berkat pertolongan-Nya. Dalam lelah diberikan kekuatan, dalam ragu diberikan petunjuk. Semoga setiap hasil dan pencapaian ini senantiasa berada dalam ridha-Nya dan menjadi jalan menuju kebaikan di masa depan.
2. Kepada Papa Delsy Arnas dan Mama Dian Budi Kurniasari tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa batas. Tiap nasihat, semangat, dan dukungan yang kalian berikan menjadi sumber kekuatan terbesar dalam menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi tempat pulang terbaik, yang dengan kesabaran dan ketulusan hati selalu mendampingi dari awal hingga akhir proses ini. Pencapaian ini ku persembahkan untuk kalian sebagai wujud cinta, hormat, dan terima kasih atas segala hal yang telah diberikan tanpa pamrih.

3. Untuk keluarga dan saudara-saudara yang selalu memberi dukungan, terima kasih atas doa, semangat, dan pengertian yang tak pernah putus. Kehangatan dan kebersamaan kalian adalah alasan kuat untuk terus berjuang dan tidak menyerah.
4. Untuk Viona Vanessa, terima kasih atas kebersamaan, pengertian, dan dukungan yang tulus selama proses ini berlangsung. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu hadir memberi semangat di saat lelah, menenangkan di saat ragu, dan mengingatkan untuk tetap fokus pada tujuan. Kehadiranmu telah memberikan motivasi besar dan membantu menjaga keseimbangan di tengah segala kesibukan dan tekanan. Pencapaian ini juga merupakan bagian dari dukungan dan kesabaranmu yang begitu berarti sepanjang perjalanan ini.
5. Kepada Ayah, Ibu, Cece, dan Abang, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan penerimaan yang tulus. Kehadiran kalian menjadi kekuatan yang menemani proses ini hingga tuntas.
6. Kepada teman mendakiku yaitu para sepupuku, Alif, Ridho, dan Rifha, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan keceriaan yang selalu menguatkan di setiap perjalanan, baik di bukit maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Lay, Kodok, Lipo, Rui, dan Raja, terima kasih untuk persahabatan panjang sejak SMP, SMA, hingga sekarang. Info perkopian, dukungan, canda, dan waktu yang kalian berikan sangat berarti dalam menyelesaikan karya ini.

8. Kepada seluruh teman-teman HI 2021, terima kasih atas kebersamaan, tawa, dukungan, serta semangat yang telah kita bagi bersama. Setiap cerita dan perjuangan menjadi bagian berharga dari perjalanan ini.
9. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diajarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Bencana Karhutla di Kalimantan Barat sebagai Ancaman Keamanan Kolektif Terhadap Hubungan Indonesia-Malaysia Tahun 2019" dengan baik dan tepat waktu.

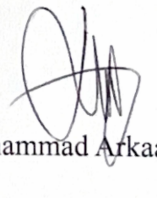
Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis sadar akan kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena hasil yang dicapai merupakan langkah awal dari ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
4. Dr. Elyta, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA).

5. Dewi Suratiningsih, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP, M.A, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah banyak membantu sehingga proposal ini dapat selesai dengan baik.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang berarti bagi kita semua yang memerlukan.

Pontianak, 12 Januari 2026



Muhammad Arkaan Thaariq

NIM. E1111211054

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **x**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xxii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 11
1.3 Fokus Penelitian 12
1.4 Rumusan Masalah 13
1.5 Tujuan Penelitian 13
1.6 Manfaat Penelitian 13
1.6.1 Manfaat Teoritis 13
1.6.2 Manfaat Praktis 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**
2.1 Definisi Konsep 15
2.1.1 Konsep Keamanan Kolektif 15

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 24
2.3 Alur Pikir Penelitian 30
2.4 Pertanyaan Penelitian 31
BAB III METODE PENELITIAN 32
3.1 Jenis Penelitian 32
3.2 Langkah-langkah Penelitian 33
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 35
3.3.1 Lokasi Penelitian 35
3.3.2 Waktu Penelitian 36
3.4 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi 37
3.4.1 Unit Analisis 37
3.4.2 Unit Eksplanasi 37
3.4.3 Tingkat Analisis 37
3.5 Teknik Pengumpulan Data 38
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 39
3.7 Analisis Data 39
3.7.1 Keabsahan Data 39
3.7.2 Teknik Analisis Data 40
BAB IV GAMBARAN UMUM 42
4.1 Profil Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 42
4.2 Profil Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia 46
4.2.1 Geografi Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia 48
4.2.2 Demografi Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia 51
4.2.3 Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 55
4.3 Profil Negara Malaysia 57
4.3.1 Geografi Negara Malaysia 58
4.3.2 Demografi Negara Malaysia 60
4.4 *Asean Agreement on Transbondary Haze Pollution* (AATHP) 63
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 69
5.1 Pengaruh Bencana Karhutla di Kalimantan Barat terhadap Hubungan Indonesia-Malaysia Tahun 2019 melalui *Identification of a Threat* 69
5.1.1 Kronologi Karhutla 2019 dan Munculnya Ancaman Lintas Batas 70
5.1.2 Dinamika Diplomasi Bilateral dan Regional 77

5.2 Pengaruh Bencana Karhutla di Kalimantan Barat terhadap Hubungan Indonesia-Malaysia Tahun 2019 melalui *Response* 83
5.2.1 Aktivasi *Asean Agreement on Transbondary Haze Pollution* dan Satgas Nasional..... 84
5.2.2 Koordinasi Formal dan Tensi Diplomatik..... 88
BAB VI PENUTUP 94
6.1 Kesimpulan 94
6.2 Saran..... 96
6.3 Keterbatasan Penelitian..... 98
DAFTAR PUSTAKA..... 100
LAMPIRAN..... 109

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*
2. 1 PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU 28
2. 2 ALUR PIKIR PENELITIAN 30
3. 1 WAKTU PENELITIAN 36
4. 1 DATA PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2024 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1. Luas Karhutla Kalimantan Barat 2015-2024 3
2. Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 48
3. Struktur Organisasi DLHK Provinsi Kalimantan Barat 55
4. Peta Wilayah Negara Malaysia 58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*
1. Daftar Pertanyaan Wawancara 109
2. Dokumentasi Wawancara 111
3. Surat Tugas Penelitian 112
4. Biodata Mahasiswa 113

DAFTAR SINGKATAN

AATHP	: *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*
ACC-THPC	: *ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control*
API	: *Air Pollutant Index*
ASEAN	: *Association of Southeast Asian Nations*
ASMC	: *ASEAN Specialized Meteorological Centre*
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
DLHK	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KARHUTLA	: Kebakaran Hutan dan Lahan
KEMLU RI	: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MPA	: Masyarakat Peduli Api
MSC	: *Ministerial Steering Committee*
PDB	: Produk Domestik Bruto
SIPONGI	: Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam konteks hubungan internasional, isu lingkungan seperti kabut asap lintas batas memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara (Robertua et al., 2022). Ketika bencana ekologis seperti karhutla terjadi, hal ini tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga menyentuh ranah hubungan antar negara, khususnya apabila dampaknya meluas hingga ke wilayah negara tetangga seperti yang terjadi pada Indonesia dan Malaysia.

Dalam kasus Indonesia dan Malaysia, kabut asap akibat karhutla menimbulkan keresahan dan ketegangan diplomatik, mengingat Malaysia mengklaim kualitas udara yang memburuk akibat asap dari wilayah Indonesia. Kebakaran hutan di Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap polusi udara regional, termasuk ke negara-negara tetangga yang salah satunya adalah Malaysia (Putri et al., 2024).

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia dilakukan dengan menggunakan metode pembakaran lahan untuk membuka area pertanian dan perkebunan. Cara ini sering dipilih karena dianggap murah dan efisien, namun sering kali tidak terkendali sehingga api meluas ke kawasan hutan yang lebih luas. Praktik ini umumnya dilakukan oleh petani lokal maupun perusahaan besar untuk memperluas lahan perkebunan maupun tanaman industri lainnya. Hampir

99% kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia yang secara sengaja membakar lahan. Dampak dari kebakaran ini sangat merugikan, termasuk kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan gangguan kesehatan akibat asap yang ditimbulkan (Syaufina, 2008).

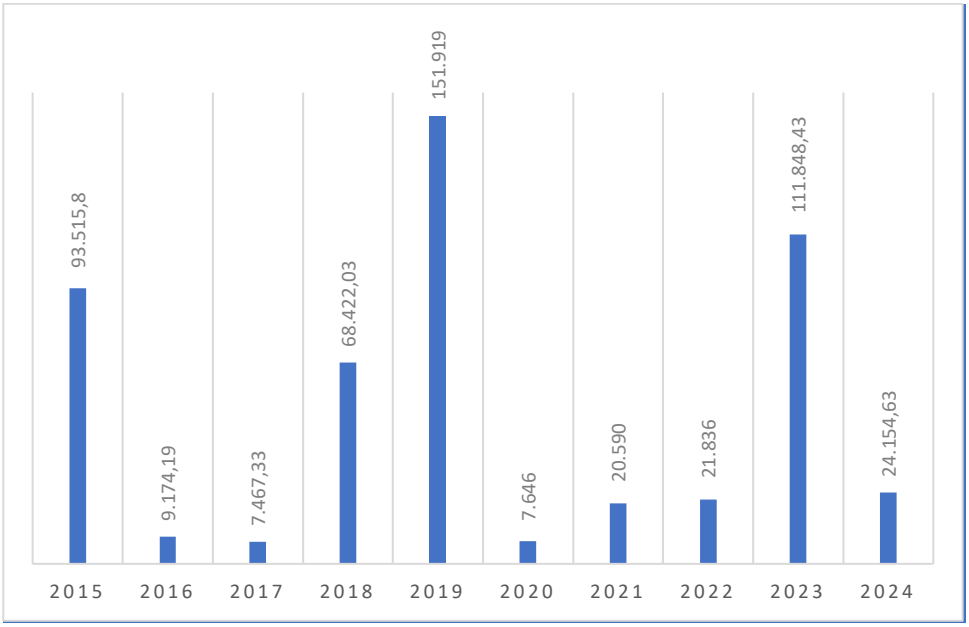
Selain dipengaruhi oleh aktivitas manusia, kondisi iklim juga berperan dalam meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau menyebabkan vegetasi menjadi lebih kering sehingga lebih mudah terbakar dan meningkatkan kemungkinan terjadinya karhutla (Cochrane, 2009). Meskipun sebagian besar karhutla dipicu oleh manusia, faktor iklim seperti musim kemarau berfungsi sebagai pemicu yang kemudian memperburuk risiko dan skala bencana secara signifikan.

Musim kemarau yang berkepanjangan juga menyebabkan tanah gambut mengering secara signifikan, mengurangi kadar kelembapannya, dan meningkatkan kerentanannya terhadap kebakaran hutan (Agus, 2018). Saat terbakar, api pada lahan gambut sulit dipadamkan dan menghasilkan asap dalam jumlah besar.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik tersebut adalah Kalimantan Barat. Provinsi ini memiliki hamparan lahan gambut yang luas sehingga berpotensi tinggi mengalami bencana karhutla. Fenomena karhutla di Kalimantan Barat telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada berbagai aspek kehidupan, baik pada aspek ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya, maupun kerusakan lingkungan hidup

(Saputro et al., 2021). Dampak karhutla yang multisektor ini menunjukkan bahwa biaya pemulihan pasca-bencana jauh lebih besar daripada biaya pencegahan yang seharusnya diinvestasikan sejak awal. Selain itu, letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan provinsi ini sebagai salah satu sumber transboundary haze pollution bagi negara tersebut (Hafnizal, 2018).

Gambar 1. 1 Luas Karhutla Kalimantan Barat 2015-2024



Sumber: Sipongi, KLHK, 2025

Fenomena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat bukanlah peristiwa yang baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir, melainkan telah menjadi persoalan lingkungan yang berlangsung selama beberapa dekade. Salah satu episode karhutla terbesar yang pernah terjadi di Kalimantan, termasuk wilayah Kalimantan Barat, berlangsung pada periode El Niño tahun 1997–1998. Pada periode tersebut, kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi secara masif akibat kombinasi pembukaan lahan dengan cara

membakar dan kondisi kekeringan ekstrem. Levine (1999) menjelaskan bahwa kebakaran yang terjadi di Kalimantan dan Sumatra pada tahun 1997 merupakan salah satu bencana kebakaran tropis terbesar di dunia, dengan luasan area terbakar mencapai sekitar 45.600 km² selama periode Agustus hingga Desember 1997. Peristiwa tersebut menjadi titik awal meningkatnya perhatian internasional terhadap persoalan kebakaran hutan di Indonesia karena dampak asapnya telah melampaui batas negara dan memengaruhi kawasan Asia Tenggara secara luas.

Setelah peristiwa tersebut, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus berulang dengan tingkat intensitas yang berfluktuasi, terutama pada tahun-tahun yang dipengaruhi oleh fenomena El Niño. Rachman et al. (2020) menjelaskan bahwa karakteristik ekologis Kalimantan Barat yang didominasi oleh lahan gambut, ditambah dengan praktik pembukaan lahan menggunakan api, menjadikan provinsi ini sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi di Indonesia. Lebih lanjut, periode El Niño kuat pada tahun 2015 memperparah kondisi kekeringan di Kalimantan Barat sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Ihwan et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor iklim ekstrem memiliki peran penting dalam berulangnya kejadian karhutla di wilayah tersebut.

Meskipun kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, data menunjukkan bahwa tahun 2019 merupakan periode dengan tingkat keparahan tertinggi dalam satu

dekade terakhir di provinsi tersebut. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) yang ditampilkan pada Gambar 1.1, luas lahan terbakar di Kalimantan Barat pada tahun 2019 mencapai 151.919 hektare, melampaui kejadian besar sebelumnya pada tahun 2015. Temuan ini sejalan dengan penelitian Anastasia et al. (2021), yang menunjukkan bahwa indeks bahaya kebakaran (Fire Weather Index/FWI) di Kalimantan Barat mencapai tingkat tertinggi pada periode 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingginya intensitas kebakaran pada tahun tersebut kemudian menjadikan karhutla 2019 sebagai salah satu bencana lingkungan paling serius yang tidak hanya berdampak pada masyarakat Kalimantan Barat, tetapi juga memicu persoalan kabut asap lintas batas yang memengaruhi hubungan Indonesia dan Malaysia.

Karhutla pada tahun 2019 kemudian mengakibatkan polusi udara yang merugikan bukan hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi beberapa negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya isu keamanan lingkungan yang bersifat lintas batas (Wicaksono, 2017).

Dampak lintas batas tersebut terlihat jelas dalam hubungan Indonesia dan Malaysia. Hubungan diplomatik antara kedua negara dalam beberapa waktu terakhir dianggap kurang harmonis akibat bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang memicu reaksi dari Pemerintah Malaysia, yang menuduh Indonesia tidak serius dalam menangani permasalahan tersebut. Indikator pencemaran udara di Malaysia

menunjukkan kualitas udara pada tingkat yang tidak sehat. Hampir setiap tahun, Malaysia menuduh Indonesia sebagai penyebab kabut asap yang menyelimuti negaranya (Bilqis, 2020).

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia telah melintasi perbatasan dan mengganggu aktivitas masyarakat di Malaysia. Dari aspek sosial-ekonomi, Pemerintah Malaysia menerapkan beberapa kebijakan sebagai respons terhadap kabut asap yang berasal dari Indonesia, salah satunya adalah menutup lebih dari seribu sekolah akibat memburuknya kondisi udara (Bilqis, 2020). Hal ini terjadi karena kualitas udara yang buruk sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan.

Tidak sedikit negara di Asia Tenggara yang ikut terdampak telah melemparkan protes akibat kabut asap yang mengganggu kestabilan negara mereka. Salah satu respons paling menonjol datang dari Pemerintah Malaysia, yang mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Indonesia karena memburuknya kondisi udara di wilayahnya. Tindakan diplomatik ini menjadi sorotan dalam negeri, dan dinilai sebagai teguran keras atas ketidakmampuan Indonesia mengatasi persoalan karhutla yang berulang. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, bahkan menyebut bahwa protes dari negara tetangga tersebut merupakan bentuk teguran yang cukup memalukan, karena masalah kabut asap bukanlah hal baru dan sudah sering menimbulkan keluhan dari negara seperti Malaysia dan Singapura. Ia

menambahkan bahwa protes tersebut mencederai harga diri bangsa, karena menunjukkan bahwa Indonesia tidak mampu menyelesaikan masalah yang timbul dari wilayahnya sendiri (Rahmawati, 2023).

Malaysia melakukan protes tidak hanya satu atau dua kali saja, tetapi protes ini sudah menjadi langganan dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2006 dan 2010 kemudian mengirimkan nota protes lagi pada tahun 2015, respon pemerintah Indonesia yang lambat mengakibatkan malaysia beranggapan bahwa Indonesia tidak serius dalam menangani kasus kebakaran hutan (Zadok, 2017). Siklus protes yang berulang dari Malaysia mengindikasikan defisit kepercayaan yang signifikan terhadap komitmen dan keseriusan Indonesia dalam mengatasi akar masalah karhutla.

Protes tersebut dinilai beralasan, mengingat Indonesia merupakan salah satu anggota Kesepakatan ASEAN mengenai Pencemaran Asap Lintas Batas atau *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*. Kesepakatan ini merupakan perjanjian pertama di dunia yang mengikat sejumlah negara yang berbatasan untuk mengatasi polusi kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Namun, pada kenyataannya, hingga tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi sehingga Indonesia dinilai tidak efektif dalam mencegah maupun mengatasi persoalan tersebut di negaranya (Bilqis, 2020). Keanggotaan dan kegagalan Indonesia di AATHP justru memperburuk kritik dimana perjanjian regional seharusnya menjadi solusi, namun tidak efektif tanpa implementasi domestik yang konsisten.

Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya merupakan anggota *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP), yang ditandatangani oleh sepuluh negara ASEAN pada tahun 2002 (Bilqis, 2020). Indonesia sendiri baru meratifikasi perjanjian tersebut pada 16 September 2014 setelah memperoleh persetujuan dari seluruh fraksi. Ratifikasi ini disambut baik oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya dan menjadikan Indonesia memiliki peran penting secara hukum dalam pengambilan keputusan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Mawarningtyas, 2024).

Sebelum ratifikasi AATHP dilakukan, Indonesia sebenarnya telah menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sejak tahun 1985, diplomasi jalur pertama (*first track diplomacy*) dilakukan secara bilateral melalui patroli udara untuk mengatasi kabut asap serta pemberian peringatan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Kerja sama tersebut kemudian berkembang menjadi perjanjian bilateral melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 1997 yang mencakup pembukaan lahan tanpa membakar (zero burning), pemantauan dan pencegahan melalui pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, pemadaman kebakaran, sistem peringatan dini, penegakan hukum, pelatihan petugas pemadam dan tenaga medis, serta peningkatan kerja sama teknis di wilayah rawan kebakaran. Pada tahun 2006, kerja sama tersebut kembali diperkuat melalui pelatihan masyarakat sekitar hutan dalam penerapan zero burning

serta peningkatan kapasitas sukarelawan dan tenaga medis (Finaldin dan Dhani, 2021).

Meskipun berbagai bentuk kerja sama telah dilakukan, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat masih menjadi persoalan lingkungan yang serius, dengan tingkat keparahan tertinggi terjadi pada tahun 2019. Kebakaran hutan di Indonesia juga sering diperparah oleh lemahnya penegakan hukum serta kurangnya kesadaran lingkungan (King, 2013).

Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem, tetapi juga memperburuk kualitas udara dan berdampak pada kesehatan masyarakat setempat. Pada tahun 2019, lebih dari 800.000 hektare hutan dan lahan terbakar di Indonesia, dengan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah yang terdampak paling parah. Peristiwa ini menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada hasil hutan (Halim et al., 2019).

Pemantauan satelit dan laporan lapangan menunjukkan bahwa kebakaran hutan di Kalimantan Barat pada tahun 2019 tidak hanya berdampak pada wilayah Indonesia, tetapi juga meluas hingga ke negara tetangga. Asap yang dihasilkan menyebar ke Malaysia sehingga menyebabkan gangguan penerbangan dan penutupan sekolah. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2019 menyebabkan kerugian ekonomi sebesar USD 5,2 miliar atau setara dengan 0,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Arumingtyas, 2019).

Besarnya dampak yang ditimbulkan, baik secara domestik maupun internasional, mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Salah satu langkah yang diambil adalah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Instruksi tersebut menugaskan kementerian, lembaga, serta kepala daerah untuk melaksanakan pengendalian karhutla sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai instansi teknis utama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan berbagai strategi pengendalian, mulai dari pemantauan titik hotspot berbasis satelit, peningkatan patroli terpadu di daerah rawan karhutla, kerja sama lintas sektor, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, pembinaan masyarakat melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA), modifikasi cuaca (TMC), hingga penguatan kerja sama regional dan internasional dalam penanggulangan karhutla (Kementerian Kehutanan, 2025).

Melihat dampak yang ditimbulkan, kabut asap lintas batas akibat karhutla dapat dipandang sebagai ancaman keamanan non-tradisional karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara asal, tetapi juga oleh negara lain yang terdampak. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, penyebaran kabut asap dari Kalimantan Barat ke wilayah Malaysia menunjukkan bahwa karhutla tidak lagi hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga menjadi permasalahan yang dapat memengaruhi hubungan antarnegara.

Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar penelitian ini untuk menggunakan Konsep Keamanan Kolektif (*Collective Security*) dari Alexander Orakhelashvili (2011), yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap suatu ancaman dan respons terhadap ancaman tersebut. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan melalui dua indikator, yaitu *Identification of a Threat* untuk melihat bagaimana kabut asap diidentifikasi sebagai ancaman lintas batas, serta *Response* untuk melihat respons Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi ancaman tersebut melalui hubungan bilateral maupun kerja sama regional.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memaparkan bagaimana hubungan antara Indonesia dan Malaysia setelah adanya kabut asap lintas batas yang berkepanjangan dari Indonesia khususnya Kalimantan Barat ke Malaysia serta melihat bagaimana keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menangani fenomena karhutla yang seperti menjadi rutinitas tahunan ini agar permasalahan tersebut segera teratasi.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka identifikasi masalah penelitian yang ditemukan penulis antara lain:

1. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat masih terus berulang dengan tingkat keparahan yang tinggi sehingga

menimbulkan kabut asap lintas batas yang berdampak terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia.

2. Berulangnya protes dari Malaysia menunjukkan masih rendahnya efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya pencemaran asap lintas batas.
3. Berbagai kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia maupun kerja sama regional melalui *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) belum mampu mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas, khususnya pada peristiwa karhutla tahun 2019.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai pengaruh bencana karhutla di Kalimantan Barat sebagai ancaman keamanan kolektif terhadap hubungan Indonesia-Malaysia tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Konsep Keamanan Kolektif dari Alexander Orakhelashvili (2011) dengan memfokuskan analisis pada dua indikator, yaitu *identification of a thre*at dan *response*. *Identification of a threat* digunakan untuk melihat bagaimana karhutla dan kabut asap diidentifikasi sebagai ancaman lintas batas, sedangkan *response* digunakan untuk menganalisis respons Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi ancaman tersebut melalui hubungan bilateral maupun kerja sama regional. Penelitian difokuskan pada tahun 2019 karena masalah kabut asap yang terjadi merupakan yang terbesar, khususnya dalam

sepuluh tahun terakhir, serta berdampak terhadap negara-negara di Asia Tenggara, terutama Malaysia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dibagian latar belakang, rumusan masalah yang diperoleh penulis ialah "Bagaimana pengaruh bencana karhutla di Kalimantan Barat sebagai ancaman keamanan kolektif terhadap hubungan Indonesia-Malaysia tahun 2019?".

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh bencana karhutla di Kalimantan Barat sebagai ancaman keamanan kolektif terhadap hubungan antara Indonesia dan Malaysia tahun 2019.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi dalam pengembangan kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami isu keamanan non-tradisional berupa bencana lingkungan lintas batas. Penelitian ini menggunakan Konsep Keamanan Kolektif (*Collective Security*) yang dikemukakan oleh Alexander Orakhelashvili (2011) untuk menganalisis bagaimana bencana karhutla di Kalimantan Barat dapat dipandang sebagai ancaman yang berdampak terhadap kepentingan bersama serta bagaimana respons yang diberikan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi ancaman tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman

mengenai penerapan Konsep Keamanan Kolektif melalui indikator *identification of a threat* dan *response* dalam menganalisis hubungan antarnegara yang dipengaruhi oleh isu lingkungan lintas batas, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keamanan kolektif, isu lingkungan, dan hubungan Indonesia-Malaysia.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan khususnya mengenai dampak dari karhutla Kalimantan Barat terhadap hubungan Indonesia-Malaysia serta mengetahui apa saja yang dapat menjadi penyebab dari karhutla itu sendiri. Selain itu, tulisan ini bisa menjadi salah satu referensi atau panduan yang berguna dalam upaya memperluas pengetahuan mengenai penyebab terjadinya karhutla serta dampaknya terhadap hubungan Indonesia-Malaysia.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang menekuni kajian perbatasan, sebagai bahan pembelajaran dan referensi dalam memahami dinamika hubungan antarnegara yang dipengaruhi oleh isu lingkungan seperti karhutla di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.